Dalam konteks paradigma kebijakan publik, analisis kenaikan harga BBM di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan fokus pada elemen-elemen berikut:

1. Identifikasi masalah/gejala:

- 1) Identifikasi gejala kenaikan harga BBM di Kota Bandar Lampung, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak jenis tertentu (misalnya, Pertalite, Pertamax, Solar).
- 2) Tinjau sejauh mana kenaikan harga tersebut memengaruhi masyarakat Bandar Lampung secara umum, termasuk dampaknya pada harga barang dan jasa lainnya.

2. Identifikasi pihak yang terlibat:

1) Tentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan BBM, termasuk pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan masyarakat Bandar Lampung.

3. Analisis Kebijakan yang ada:

- Tinjau kebijakan pemerintah terkait harga BBM, termasuk subsidi, pajak, dan regulasi harga.
- 2) Evaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap harga BBM di tingkat lokal (Bandar Lampung) dan nasional.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi:

- 1) Tinjau dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat Bandar Lampung, termasuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga.
- 2) Evaluasi dampak ekonomi secara lebih luas, seperti inflasi dan daya beli masyarakat.

5. Alternatif kebijakan:

 Pertimbangkan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, seperti subsidi langsung kepada masyarakat atau pengembangan energi terbarukan.

6. Evaluasi kebijakan yang ada:

1) Evaluasi kebijakan yang telah ada dalam menangani kenaikan harga BBM di Bandar Lampung dan efektivitasnya dalam meredakan dampaknya.

7. Rekomendasi kebijakan:

1) Berdasarkan hasil analisis, rekomendasikan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak terkait lainnya untuk mengelola kenaikan harga BBM di Kota Bandar Lampung dengan lebih efektif.

8. Implementasi dan Monitoring:

1) Setelah kebijakan diambil, penting untuk mengimplementasikannya dengan baik dan terus memantau dampaknya. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi masalah kenaikan harga BBM.

Dengan mengikuti pendekatan paradigma kebijakan publik, langkah-langkah ini akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan yang efektif dalam mengatasi kenaikan harga BBM di Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.